

**HOTLINE REDAKSI**

Telp. (0751) 25001-36923  
 Fax. (0751) 33572  
 email : singgalang\_redaksi@gmail.com  
 website : www.hariansinggalang.co.id  
 epaper : epaper.hariansinggalang.co.id

**INFO & PENGADUAN**

Tlp. (0751) 25001-38338  
 Fax. (0751) 811005  
 Iklan : 08126605015  
 Pemasaran : 085355173999  
 Redaksi : (0751) 36923  
 email : ikhansinggalang@yahoo.co.id

Rabu, 10 Juli 2024 (4 Muharram 1446 H)

16 Halaman (Dalam 2 Bagian)

Rp5.000,-<sup>+</sup> Luar Kota + Ongkos Kirim

**Jadwal Shalat Hari Ini**

Subuh : 05.01 WIB  
 Zuhur : 12.27 WIB  
 Ashar : 15.51 WIB  
 Maghrib : 18.29 WIB  
 Isya : 19.43 WIB

kalam.sindonews.com

**KOMENTAR**

## Merenungkan Kembali Makna Penting Data

SUGENG WINARNO

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware. Serangan yang berlangsung sejak Kamis (20/6/2024) itu menyebabkan tak kurang 210 instansi pusat dan daerah terdampak. Dampak jelas terlihat pada layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia lumpuh seketika untuk beberapa waktu. Antrean mengular di sejumlah bandara, khususnya di titik pemeriksaan paspor.

Serangan hacker ke server pusat-pusat data penting di negeri ini masih terus berulang. Biasanya serangan siber juga dibarengi dengan bocornya data pribadi masyarakat. Dalam kasus serangan PDNS perlu diwaspadai, jangan-jangan ketika permintaan tebusan sejumlah uang dari hacker tak dipenuhi lantas banyak data penting bakal dibocorkan. Hal ini tentu berbahaya karena kebocoran data berpotensi memunculkan beragam modus kejahatan.

Dalam beberapa kasus bocornya data masyarakat menjadi bukti buruknya pengamanan data pribadi yang belakangan menjadi keresahan masyarakat. Munculnya sejumlah kasus kebocoran data semakin menebalkan keraguan rakyat akan perlindungan negara terhadap data pribadi. Peristiwa ini tak bisa dibiarkan karena hal ini dapat menjadi pintu masuknya berbagai jenis kejahatan yang berbasis data digital.

**Tambang Minyak Baru**

Data adalah tambang minyak baru (data is the new oil). Bahkan data bisa lebih berharga dari minyak. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa data yang akurat adalah kekayaan baru yang sangat berharga saat ini, bahkan nilainya bisa lebih berharga daripada minyak. Data bisa sangat berarti dalam perencanaan pemba-

Bersambung ke A-7

**Zakat Penghasilan**  
 Sumber yang bersih lebih aman, lebih barokah

Salurkan Zakat Anda melalui:

mandiri 111.000.500.4888  
 an Dompot Dhuafa Singgalang

BSI 234.2222.40  
 an Dompot Dhuafa Republik

Informasi: (0751) 40098 & 08126702333

www.ddsinggalang.org

**Pojok**

- + Tol Padang-Sicincin kelar akhir tahun ini  
 - Kelar ka kelar sae sajak sari lai mah, iyo sabana e lai ko...
- + Maek punya peradaban hebat  
 - Ebat mlah, ma nan tuo paradabannyo sajak gunuang marapi sagadang talua itiki...?

*teggama*



**RAKOR KESIAPAN PILKADA SERENTAK 2024**

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Mendagri Tito Karnavian (kedua kanan), Pj Ketua KPU Mochammad Affiduddin (kanan), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kiri) dan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni (kedua kiri), berikan keterangan kepada wartawan usai Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024). (antara)

# Maek Punya Peradaban Hebat

PADANG - SINGGALANG

Maek di Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, punya cerita misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Ada peradaban hebat di sana, yang bila terungkap, bisa mengguncang dunia.

Yang jelas, untuk pertama kalinya, sebuah festival seni dan budaya berskala internasional akan digelar di Negeri Seribu Menhir itu pada Juli ini. Menariknya, acara yang diberi nama "Festival Maek 2024" ini, bukan hanya soal pertunjukan, namun juga menjadi langkah dan upaya menggali lebih dalam, memperkenalkan lebih jauh, tentang



**JUMPA PERS** - Ketua DPRD Sumbar Supardi, Kepala Dinas Kebudayaan, Jefrinal Arifin dan Kurator Festival Maek, S. Metron dalam jumpa pers terkait sosialisasi "Festival Maek 2024", Selasa (9/7) di Ruang Khusus I DPRD Sumbar. (wahyu)

kawasan yang punya sejarah dahsyat tersebut.

Seperti disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dalam jumpa pers terkait sosialisasi Festival Maek, Selasa (9/7) di Ruang Khusus I DPRD Sumbar, bahwa kawasan tersebut ke depan patut dijadikan sebagai sebuah destinasi wisata khusus. "Ya, tidak saja soal

pariwisata, tapi ada misteri peradaban di kawasan Maek ini, yang perlu digali lebih dalam. Artinya, Maek itu sesungguhnya punya peradaban yang hebat," katanya.

Menurut Supardi, kehadiran Maek dengan seribu lebih menhir ini berhubungan erat dengan jejak sejarah peradaban. Apalagi, lanjutnya, menhir ini juga sedang dalam penelitian, mencari tahu kapan menhir-menhir itu mulai ada, yang kemungkinannya Maek bisa jadi masuk dalam kawasan di masa peradaban tertua dunia.

"Saat ini, fosil tengkorak yang ditemukan di Maek sedang diteliti di Australia, dan kita pun menunggu hasilnya. Seberapa lama dan sejak kapan menhir ini mulai

Bersambung ke A-7

# DPR Setuju Bentuk Pansus Angket Haji



**Jakarta, Singgalang**  
 DPR RI menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan

panitia khusus (Pansus) angket pengawasan haji dalam rapat paripurna ke-21. Pansus angket itu ber-

isikan 30 anggota dewan dari seluruh fraksi DPR RI. Mulanya, pengusul hak angket pansus haji, Selly Andriany Gantina, menyampaikan sederet pertimbangan pembentukan Pansus angket ini. Ia mengatakan pembagian kuota haji oleh Kemenag tak sesuai dengan penetapan yang sudah dilakukan pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi VII DPR RI.

"Bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia sehingga keputusan

Bersambung ke A-7



# Tol Padang-Sicincin Kelar Akhir Tahun Ini

**JAKARTA** - Dua ruas proyek jalan tol Trans Sumatera di bagian Utara Sumatera, bakal tersambung di akhir tahun ini. Dua ruas itu adalah Tol Ruas Padang-Sicincin di Sumatera Barat dan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh seksi I Padang Tidji-Seulimum di Aceh.

Ruas Padang-Sicincin dibangun sepanjang 36 kilometer. Sementara Padang Tidji-Seulimum dibangun sepanjang 25 kilometer. Kedua ruas ini akan selesai dibangun pada kuartal III atau kuartal

Bersambung ke A-7

**ADVERTORIAL**

# Kader Muhammadiyah Itu Pejuang Demokrasi dan Keadilan



**BERSAMA** - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Irman Gusman dan lainnya saat bersama kader Muhammadiyah. (ist)

**PADANG** - Pengurus Pusat Muhammadiyah menegaskan, sejak perjuangan kemerdekaan hingga mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, kader Muhammadiyah terkenal sebagai pejuang demokrasi.

"Demokrasi kita jelas, yakni menjunjung tinggi ukhawah islamiyah. Sehingga, dalam menghadapi PSU DPD RI di Sumatera Barat, sebagai kader harus menunjukkan jati diri sebagai pejuang demokrasi," ujar Anwar Abbas di hadapan massa Mu-

Bersambung ke A-7

**SEMIFINAL EURO 2024**

# Belanda Kerap Sulitkan Inggris



**VIRGIL VAN DIJK**  
 Belanda

**HARRY KANE**  
 Inggris

**MUNICH** - Duel sengit akan tersaji pada semifinal sepakbola Euro 2024. Timnas Belanda dan Timnas Inggris akan berduel di Signal Iduna Park, markas BVB Stadion Dortmund. Kick-off digelar, Kamis (11/7/2024), pukul 02:00 WIB.

Di fase grup, Belanda gagal menampilkan performa yang konsisten. Setelah menang 2-1 atas Polandia, Belanda imbang 0-0 dengan Prancis, dan kalah 2-3 dari Austria. Namun, Belanda kemudian tampil perkas di fase gugur. Belanda meng-

Bersambung ke A-7





**SUPARDI** KETUA DPRD SUMBAR  
**IRSYAD SAFAR** WAKIL KETUA DPRD SUMBAR  
**SUWIRPEN SUIB** WAKIL KETUA DPRD SUMBAR  
**INDRA DT RAJO LELO** WAKIL KETUA DPRD SUMBAR  
**RAFLIS** SEKRETARIS DPRD SUMBAR

## DPRD Sumbar Sampaikan Nota Penjelasan Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menyampaikan nota penjelasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan penyiaran saat rapat paripurna, Senin (8/7) di gedung dewan setempat.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang semakin besaruntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Hal ini telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran.

"Namun dalam konteks penyiaran yang dilakukan dalam tataran daerah masih memiliki permasalahan berkaitan dengan kekosongan norma di tingkat daerah," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Irsyad, aktualisasi penyelenggaraan penyiaran di Sumbar yang berbasis nilai-nilai kedaerahan dan segala kewenangannya harus segera diwujudkan.

Ia memaparkan, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 maka perlu dibuat regulasi tentang penyelenggaraan penyiaran. Selain itu juga sebagai perwujudan, pendayagunaan, pengembangan, serta penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam ma-



asyarakat Sumbar.

"Secara simbolik kegiatan penyiaran yang berbasis kedaerahan tersebut menjadi pengikat, simbol kebersamaan dan kedisiplinan setiap warga Sumatera Barat, hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan diajukan usul prakarsa ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran," ujarnya.

Sesuai dengan lingkup sektornya, ranperda pengelolaan penyiaran akan dibahas oleh Komisi I DPRD Sumbar.

Sekretaris Komisi I, Rafdinal mengatakan informasi telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum perannya makin



sangat strategis terutama dalam mengembangkan alam demokrasi.

"Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, dunia bisnis dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak relevan lagi," paparnya.

Indonesia telah memiliki pengaturan penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2022 yang disebut UU penyiaran. Pengamat penyiaran memandang UU ini merupakan upaya untuk melakukan demokratisasi penyiaran di Indonesia.

"Namun dalam konteks penyiaran yang dilakukan dalam tataran daerah masih memiliki permasalahan berkaitan dengan kekosongan norma di tingkat daerah," tutur Rafdinal.

Singatnya, lanjut Rafdinal, era globalisasi memberikan implikasi pada sarana komunikasi yang semakin modern. Namun di sisi lain harus diimbangi dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pembangunan pada tingkat nasional dan regional serta memiliki dampak pada kesejahteraan untuk masyarakat.

"Sementara itu, setiap wilayah memiliki potensi dan kondisi masing-masing, termasuk Sumbar," ujarnya.

Rafdinal memaparkan, permasalahan primer penyelenggaraan penyiaran di Sumbar yakni belum adanya ketercukupan aturan secara kuantitatif dan kualitatif mengatur pengkomodasian keunggulan wilayah menjadi kota budaya, kota pendidikan, kota pariwisata pada kerangka pembangunan sosial ekonomi wilayah.

Selain itu juga belum ada kerangka aturan yang mengefektifkan wewenang lembaga pemerintah wilayah dan partisipasi masyarakat un-



nilai falsafah adat basandi Syara', Syara' basandi kitabullah," ujarnya.

Kemudian untuk mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif daerah, mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, budaya, pariwisata dengan mengoptimalkan sumber daya daerah, melindungi masyarakat dari siaran yang bertentangan dengan norma sosial dan kearifan lokal.

"Meningkatkan siaran konten-konten lokal yang bermutu dan mengembangkan nilai budaya Minangkabau," katanya.

Ranperda penyelenggaraan penyiaran terdiri dari 11 bab. Diantaranya ada bab yang mengatur tentang kelembagaan penyiaran, kepemilikan lembaga penyiaran daerah, program siaran lokal, pengawasan program siaran lokal, peran serta masyarakat, sanksi dan administrasi dan ketentuan pidana.

Untuk diketahui, ranperda penyelenggaraan penyiaran merupakan usul prakarsa DPRD yang diajukan oleh ko-

alisi I. Ranperda tersebut telah ditetapkan sebagai usul prakarsa saat rapat paripurna pada 10 Juni lalu.

Saat itu Bapemperda juga telah menyampaikan hasil kajian, harmonisasi dan pembulatan terkait ranperda tersebut.

Ketua Bapemperda, Budiman mengatakan, ranperda tersebut disusun karena adanya aspirasi masyarakat terkait penyiaran, yakni diharapkan dalam konten pemberitaan lebih mengutamakan adat istiadat di Minangkabau.

Selain itu, terkait ketentuan mengenai kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan sarana yang menyangkut pemberitaan dalam draf Ranperda yang diajukan merupakan kewenangan Pusat maka ketentuan tersebut tidak perlu diatur dalam draf Ranperda ini.

"Sehingga Kami dari Bapemperda menyarankan agar muatan ranperda difokuskan pada materi penyiaran saja yang disesuaikan dengan etika, budaya dan filosofi masyarakat Minangkabau," ujarnya. (•)

